

Pengelolaan Barang Milik Negara Melalui Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern

Ta'ti Masruhati

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
E-Mail Korespondensi: tati@komisiyudisial.go.id

Abstract - The study was conducted with the aim of determining the effect of human resource competence and internal control systems on State Property management with the use of information technology as a moderating variable at the Judicial Commission. This study uses a quantitative approach. The population in this study were 50 Judicial Commission employees related to BMN management. The sampling technique in this study used non-probability sampling. The sampling period started in July 2024 - August 2024. The data analysis method in this study used multiple regression model analysis with panel data and interaction tests or commonly called moderated regression analysis. The results of this study indicate that Human Resource Competence has an effect on State Property Management. The Internal Control System has an effect on State Property Management. The use of Information Technology can moderate Human Resource Competence in State Property Management. The use of Information Technology cannot moderate the Internal Control System in State Property Management.

Keywords: Human Resources Competence; Internship Control System; Management of State Assets; Utilization of Information Technology

Abstrak - Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan Barang Milik Negara dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi di Komisi Yudisial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini pegawai Komisi Yudisial yang terkait dengan pengelolaan BMN berjumlah 50 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling*. Periode pengambilan sampel dimulai pada bulan Juli 2024 – Agustus 2024. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model regresi berganda dengan data panel dan uji interaksi atau biasa disebut analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan barang milik negara. Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak dapat memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sistem Pengendalian Intern; Pengelolaan Barang Milik Negara; Pemanfaatan Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Alasan filosofis yang mendasari pembentukan Komisi Yudisial, antara lain: (1) sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan; (2) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan Mahkamah Agung dan lembaga eksternal yang berfungsi menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim; (3) Mahkamah Agung memiliki keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku dari hakim (Widjojanto, 2009).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas nya, Komisi Yudisial juga tidak terlepas dari pengelolaan Barang Milik Negara, yang mana aset tetap tersebut berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Barang Milik Negara didefinisikan sebagai semua barang yang berasal dari dana pemerintah. Dana pemerintah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Barang Milik Negara ini bisa juga berasal dari luar APBN asalkan perolehan nya dianggap sah oleh Undang-Undang.

Pengelolaan BMN merupakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Sepiyana & Hermain, 2023).

Pengelolaan BMN di Komisi Yudisial saat ini telah memanfaatkan teknologi/sistem, bahkan Komisi Yudisial salah satu instansi yang dijadikan sebagai pilot project pengguna aplikasi SAKTI dan SIMAN. Dalam pengelolaan BMN Komisi Yudisial menggunakan aplikasi:

SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Negara), adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN.

SAKTI (sistem aplikasi keuangan tingkat instansi), adalah aplikasi yang mendukung implementasi sistem pertendaharaan dan anggaran negara.

Dengan adanya aplikasi untuk pengelolaan BMN di atas tentu saja sangat efektif karena menjadikan data terintegrasi antara pengguna BMN dan pengelolaan BMN. Namun bukan berarti tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya, adapun kendala yang dihadapi antara lain: a) Ketersediaan sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi; b) Kemampuan sumber daya manusia yang memegang peranan yang sangat penting.

Pemanfaatan beberapa aplikasi Barang Milik Negara tentu bermanfaat bagi pengelolaan Barang Milik Negara oleh Komisi Yudisial dan dinilai sangat berhasil dalam hal pelaporan yang terintegrasi dengan entitas lain. Namun secara internal, pengelolaan berbagai hal masih perlu banyak koreksi, mulai dari pemanfaatan, penggunaan, penatausahaan, dan yang terpenting adalah kesadaran pegawai mengenai pentingnya Barang Milik Negara. Barang Milik

Negara perlu dikelola agar selaras dengan tujuan pemerintah yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya terutama pada kesejahteraan masyarakat. Proses agar tujuan ini tercapai dinamakan Pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara harus dilandasi dengan asas-asas seperti asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Menurut Nurbiyanto (2022) pengelolaan kekayaan Negara khususnya kekayaan negara berupa BMN mempunyai siklus yang cukup panjang. Siklus pengelolaan BMN dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Namun dalam kenyataannya, pengelolaan BMN belum dikelola secara efektif dan efisien sebagaimana catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Kemenkumham, 2017). Adanya permasalahan tata kelola aset di daerah salah satunya dipengaruhi pengelolaan aset Negara yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa (BPKP, 2015). Pentingnya bagi Komisi Yudisial dalam mengelola Barang Milik Negara, salah satunya karena nilai asset BMN pada Komisi Yudisial cukup besar, seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Table 1 Data Pengelolaan Barang Milik Negara Di Komisi Yudisial

NO	AKUN NERACA	SALDO BMN TA 2023
1.	Aset Lancar	Rp.2.594.280.820
2.	Aset Tetap	Rp 378.672.119.876
3.	Properti Investasi	0
4.	Aset Lainnya	Rp.148.751.425
TOTAL SALDO		Rp 381.415.152.121

Berdasarkan Tabel 1 di atas, pada tahun anggaran 2023, total saldo Barang Milik Negara (BMN) tercatat sebesar Rp381.415.152.121. Komposisi terbesar berasal dari aset tetap senilai Rp378.672.119.876, yang mencerminkan dominasi investasi jangka panjang seperti gedung, tanah, dan peralatan. Aset lancar tercatat sebesar Rp2.594.280.820, sedangkan aset lainnya sebesar Rp148.751.425. Tidak terdapat saldo pada kategori properti investasi. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN lebih terfokus pada pemilikan dan pemanfaatan aset tetap. Sebagaimana dalam PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa aset lancar dalam table di atas adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah seperti alat tulis kantor. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Sedangkan aset lainnya adalah aset tetap tak berwujud, aset lain-lain termasuk akumulasi penyusutan aset lainnya.

Selanjutnya, dengan adanya peraturan perundangan atas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mulai tahun 2015 termasuk penerapannya pada BMN memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap tingkat kompetensi pegawai dalam pengelolaan BMN dengan menggunakan aturan yang baru standar baru. Tingkat kompetensi pegawai ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan akhir yang dimiliki pegawai, karena melalui

Pendidikan terdapat proses penambahan pengetahuan pegawai yang akan berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai. SDM di unit ini baru sebagian yang memang berlatar belakang dari program pendidikan di bidang aset, sebagian jabatan fungsional pengadaan dan sebagian lagi masih jabatan fungsional umum. Sementara untuk pegawai secara keseluruhan tidak memahami secara mendalam arti pentingnya BMN. Tabel di bawah ini menjelaskan kondisi Tingkat Pendidikan pegawai dan status pegawai Komisi Yudisial saat ini.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan dan Status Pegawai Di Komisi Yudisial

Level Pendidikan	Prosentase
Lain-lain	1 %
D3	5 %
S1	59 %
S2	33 %
S3	1 %
Status Kepegawaian	
PNS	70 %
PPPK	8 %
POLRI	0 %
PPPNS	22 %
Total	100%

Sumber: Komisi Yudisial (2023)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 59%, diikuti oleh Strata 2 (S2) sebanyak 33%, sementara lulusan Diploma 3 (D3) hanya 5%, dan Strata 3 (S3) serta kategori lain-lain masing-masing sebesar 1%. Dari sisi status kepegawaian, 70% merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22% adalah Pegawai Pemerintah Non-PNS (PPPNS), dan 8% merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedangkan dari unsur POLRI tidak terdapat pegawai. Komposisi ini menunjukkan bahwa instansi didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi dan berstatus PNS. Selanjutnya mengacu pada tabel, status kepegawaian di Komisi Yudisial mayoritas adalah berstatus PNS dengan persentase sebesar 70%. Kemudian sebesar 22 % berstatus kepegawaian sebagai Penghubung selanjutnya adalah PPPK sebesar 8 %.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan BMN dilakukan, antara lain oleh Arlini & Darwanis (2014) membuktikan bahwa kompetensi pegawai dalam suatu organisasi yang baik dapat meningkatkan pengelolaan BMN. Sejalan dengan penelitian tersebut, Puspitarini et al. (2017) menemukan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMN. Subrata et al. (2018) dan Wahyuni (2018) membuktikan bahwa Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan Barang Milik Negara. Sementara itu, Azhar & Darwanis (2013) menemukan bahwa kompetensi dari

aparatur daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan aset daerah/BMD.

Selain faktor SDM, sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam pengelolaan barang milik Negara. Pengendalian intern atau kontrol intern dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pengelolaan barang milik negara berpengaruh signifikan positif terhadap pengamanan aset Negara. Subrata et al. (2018) menemukan sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan barang milik daerah.

Penerapan sistem informasi di setiap instansi pemerintah dimungkinkan masih berbeda-beda, sehingga perlu pengujian kembali sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN dengan objek berbeda. Saat ini, sistem informasi sangat penting dalam suatu organisasi karena pemanfaatan sistem informasi banyak dilakukan dalam berbagai aktivitas saat ini. Puspitarini et al. (2017) menyimpulkan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMN.

KERANGKA TEORITIS

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi menurut Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien. Peningkatan kompetensi merupakan program wajib yang harus diterapkan oleh pimpinan organisasi guna meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki (Suwikantara & Winaya, 2023). Dalam metode pengembangan sumber daya manusia (SDM) dianggap mumpuni jika dapat tercapai tujuannya guna meningkatkan kualitas karyawan dalam pencapaian kinerja dan target kualitas Bersama (Zulpahmi et al., 2023). Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam proses pergerakan organisasi karena kontribusi utama dari sumber daya manusia dapat menghasilkan output yang dicitacitakan organisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Pengendalian Intern

Mamuaja (2016) mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawainya dalam menyediakan suatu kepastian terkait prestasi yang diperoleh secara obyektif dalam penerapan tentang laporan keuangan, efektif dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, dan penerapan peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.

Chairannisa (2014) menjelaskan bahwa pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aset perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Mulyadi (2017) menyatakan bahwa sistem pengenalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan meliputi kegiatan sejak mulai perencanaan sampai dengan penghapusan BMN, sebagaimana dalam siklus BMN. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah dikatakan telah berjalan dengan efektif apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya. Hal yang paling penting yang perlu dicatat yaitu bahwa efektifitas tidak menyebutkan tentang seberapa besar biaya yang sudah dihabiskan dalam mencapai tujuan tersebut. Biaya bisa jadi melebihi apa yang sudah dianggarkan, bisa jadi dua kali atau terlebih tiga kali lebih besar dari yang sudah dianggarkan. Efektivitas cuma memandang apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Yuliana et al., 2021).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi informasi memegang peranan yang penting sebagai penunjang aktivitas usaha dalam suatu organisasi agar berjalan secara efektif. Pemanfaatan teknologi infomasi merupakan manfaat yang seharusnya dilakukan oleh pengguna sistem dalam melaksanakan tugasnya serta dapat mengefektifkan sesuatu (Nursin, 2023). Pemanfaatan teknologi informasi digunakan dalam mengolah data, dalam hal memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan untuk menghasilkan kualitas data serta informasi yang dihasilkan akurat. Bagi organisasi pemanfaatan teknologi informasi berdampak untuk mencapai tujuan secara akurat (Jumardi & Machmury, 2022).

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan studi di Komisi Yudisial yang berada di Jakarta. Proses penelitian yang dilakukan mencakup tahap pendahuluan, penyusunan proposal penelitian, distribusi kuesioner, pengolahan data, uji hipotesis, hingga penyelesaian laporan hasil penelitian. Penelitian berlangsung mulai bulan Juli 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pemilihan pendekatan kuantitatif dikarenakan dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis data menggunakan statistik (Sugiyono, 2020).

Salah satu langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah menentukan objek yang akan diteliti dan besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2020) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Komisi Yudisial yang terkait dengan pengelolaan BMN berjumlah 50 orang pegawai. Dalam hal penelitian ini pengambilan sampel akan dilakukan dengan cara mengambil seluruh populasi dijadikan sampel sejumlah 50 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling*.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta. Dimana populasinya adalah seluruh pegawai Komisi Yudisial yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara. Periode pengambilan sampel dimulai pada bulan Juli 2024 – Agustus 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert 1–5 yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji ahli (*expert judgement*). Instrumen diuji menggunakan korelasi antar skor butir dan total skor konstruk, serta *Cronbach's Alpha* untuk reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan SPSS versi 23 untuk regresi linear berganda dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi), serta *Sobel Test* untuk menguji pengaruh tidak langsung melalui analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini menguji pengaruh kompensasi kerja, pelatihan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang disajikan dalam bentuk nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi (Ghozali, 2018). Berikut ini merupakan hasil uji statistic deskriptif dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BMN	50	4.00	5.00	4.6676	.36037
KSDM	50	3.80	5.00	4.4560	.46606
SPI	50	3.50	5.00	4.5040	.45713
PTI	50	3.00	5.00	4.2722	.57046
Valid N (listwise)	50				

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan pengolahan data pada Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa variabel Pengelolaan barang milik negara memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 4.6676 dengan nilai maksimum sebesar 5.00 dan nilai minimum 4.00. Dengan standar deviasi sebesar 0.36037. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 4.4560 dengan nilai maksimum sebesar 5.00 dan nilai minimum 3.80. Dengan standar deviasi sebesar 0.46606. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 4.5040 dengan nilai maksimum sebesar 5.00 dan nilai minimum 3.50. Dengan standar deviasi sebesar 0.45713. Variabel Pemanfaatan Teknologi

Informasi memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 4.2722 dengan nilai maksimum sebesar 5.00 dan nilai minimum 3.00. Dengan standar deviasi sebesar 0.57046.

Hasil Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*).

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	15.529	3.346		4.641	.000
	KSDM	.810	.172	.477	4.700	.000
	SPI	.394	.088	.456	4.490	.000

a. Dependent Variable: BMN

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

$$BMN = a + 0.810 + 0.394 + e$$

Dari hasil Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan barang milik negara didapat nilai *coefficient* yaitu 0.810 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam KSDM akan meningkatkan BMN sekitar 0.810, dengan sig 0.000 yang artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan barang milik negara. Lalu pada variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara didapat nilai *coefficient* yaitu 0.394 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam SPI akan meningkatkan BMN sekitar 0.394, dengan sig 0.000 yang artinya Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan barang milik negara.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai persamaan regresi pada penelitian ini karena terdapat variabel moderasi dalam model penelitian, dimana Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan variabel moderasi. Hasil analisis regresi berganda adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen, koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Maka berikut tabel dari hasil regresi adalah:

Tabel 5. Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			

(Constant)	-37.412	32.286					
							1.159
KSDM	5.428	2.022	3.197	2.685	.010		
SPI	-.957	.788	-1.106		-.231		
							1.215
PTI	1.718	.857	2.230	2.004	.050		
KSDMPTI	.126	.050	5.743	2.502	.016		
SPIPTI	.030	.020	2.841	1.497	.142		

a. Dependent Variable: T_BMN

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

$$BMN = a + 5.428 - 0.957 + 1.718 - 0.126 + 0.030 + e$$

Dari hasil Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan barang milik negara didapat nilai *coefficient* yaitu 1.718 dengan sig 0.050 yang artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan barang milik negara. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan barang milik negara didapat nilai *coefficient* yaitu -0.126 dengan sig 0.016 yang artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan barang milik negara. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara didapat nilai *coefficient* yaitu 0.030 dengan sig 0.142 yang artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak dapat memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara.

Uji Hipotesis

Untuk mendapatkan hasil analisis data yang valid dan mendukung hipotesis pada penelitian ini, maka perlu dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi melalui beberapa pengujian dengan melihat seberapa baik model regresi dengan konsep determinasi, nilai statistik t dan uji simultan.

Uji Simultan (uji F)

Uji signifikan simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil uji simultan (uji F) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji F Model 1

Model	ANOVA ^a			F	Sig.
	Sum of Squares	df	Mean Square		
1 Regression	545.621	2	272.81	57.86	.000 ^b
				1	2
Residual	221.599	47	4.715		
Total	767.220	49			

a. Dependent Variable: BMN

b. Predictors: (Constant), SPI, KSDM

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 6, nilai F-Statistic pada model 1 adalah sebesar 57.862 dengan nilai Prob (F-statistic sebesar 0.000. Nilai probabilitas statistik F tersebut lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara.

Tabel 7. Hasil Uji F Model 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	544.692	5	108.938	21.54	.000 ^b
					0	
	Residual	222.528	44	5.057		
	Total	767.220	49			

a. Dependent Variable: T_BMN
b. Predictors: (Constant), SPIPTI, T_KSDM, T_SPI, T_PTI, KSDMPTI

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Mengacu pada Tabel 7 di atas, nilai F-Statistic pada model 2 adalah sebesar 21.540 dengan nilai Prob (F-statistic sebesar 0.000. Nilai probabilitas statistik F tersebut lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologin Informasi dalam memoderasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Efktivitas Pengelolaan Barang Milik Negara.

Uji Parsial (Uji T)

Uji hipotesis parsial atau uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai signifikan lebih kecil dari tingkat kesalahan 5% (sig. $< 0,05$) maka hipotesis diterima, dan sebaliknya. Hasil pengujian hipotesis akan dijelaskan dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	15.52	3.346		4.641	.000	
		9					
	KSDM	.810	.172	.477	4.700	.000	
	SPI	.394	.088	.456	4.490	.000	

a. Dependent Variable: BMN

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama pada Tabel 8, diketahui bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan barang milik negara memperoleh nilai *coefficient beta* dengan arah hubungan positif sebesar 0.810 dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Artinya, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh

terhadap Pengelolaan barang milik negara. Hipotesis kedua diketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara memperoleh nilai *coefficient beta* dengan arah hubungan positif sebesar 0.394 dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Artinya, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan barang milik negara.

Koefesien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Uji R^2 mempunyai kelemahan yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Maka penelitian ini menggunakan adjusted R^2 dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 9. Hasil Koefisien Detrimenasi Model 1

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.843 ^a	.711	.699	2.17137	
a. Predictors: (Constant), SPI, KSDM					

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 9, nilai R-Squared adalah model 1 sebesar 0.711. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama – sama dapat menjelaskan variable terikat yaitu Pengeloaan Barang Milik Negara sebesar 71.10% sisanya sebesar 28.90% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Koefisien Detrimenasi Model 1

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.843 ^a	.710	.677	2.24888	
a. Predictors: (Constant), SPIPTI, T_KSDM, T_SPI, T_PTI, KSDMPTI					

Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 10, nilai R-Squared adalah model 2 sebesar 0.710. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama – sama dapat menjelaskan variable terikat yaitu Pengeloaan Barang Milik Negara sebesar 71.0% sisanya sebesar 29.0% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan barang milik negara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan barang milik negara. Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam proses pergerakan organisasi karena kontribusi utama dari sumber daya manusia dapat menghasilkan *output* yang dicitacitakan organisasi. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya penyusunan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui penatausahaan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akrual atas barang milik daerah tentu tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi tersebut (Ruminigsih et al., 2020). Kompetensi SDM yang tinggi berkontribusi langsung terhadap pengelolaan barang milik negara dengan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai standar terbaik, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan penggunaan aset negara. Penelitian Kurniawan et al. (2016) dan Puspitarini et al. (2017) mengatakan kemampuan sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan BMN.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan barang milik negara. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam aspek-aspek seperti efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengelolaan barang milik negara mengacu pada bagaimana barang milik negara dikelola secara efisien, tepat guna, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern yang efektif berkontribusi langsung terhadap peningkatan pengelolaan barang milik negara. Dengan lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian risiko yang baik, aktivitas pengendalian yang tepat, sistem informasi dan komunikasi yang efisien, serta pemantauan yang berkelanjutan, organisasi dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dan kesalahan dalam pengelolaan BMN. Penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan barang milik negara, hal yang sama juga diteliti oleh Mayang (2024) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dapat digunakan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan barang milik negara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memainkan peran penting dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik negara. Teknologi informasi telah diterapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penatausahaan dan untuk menjaga akuntabilitas pelaporan aset negara. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi memoderasi kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan BMN, memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi memperkuat kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas mereka dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan BMN. Dengan demikian, teknologi informasi bukan hanya alat bantu, tetapi juga penggerak utama dalam meningkatkan pengelolaan barang milik negara melalui peningkatan kompetensi dan kinerja SDM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi et al. (2023) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara, lalu Penelitian (Anisykurlillah & Oktaviana, 2020), (Firmansyah & Hollyson, 2021), (Kurniawan et al., 2016) dan penelitian (Sundari & Mulyadi, 2018) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelaporan BMN.

Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak dapat memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak dapat memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan barang milik negara. Yang berarti dari hasil penelitian ini dalam konteks manajemen BMN, meskipun Teknologi Informasi mungkin digunakan untuk mendukung berbagai fungsi administrasi dan pengendalian, hasil ini mengindikasikan bahwa hanya dengan memperbaiki atau meningkatkan teknologi informasi saja tidak cukup untuk mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dalam mengelola BMN. Pengelolaan barang milik negara sering kali melibatkan berbagai prosedur, peraturan, dan pemangku kepentingan yang kompleks. Teknologi informasi mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi sistem pengendalian. Teknologi informasi yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan khusus yang dibutuhkan untuk mendukung sistem pengendalian BMN. Misalnya, jika sistem teknologi yang digunakan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari pengelolaan aset negara, dampaknya mungkin tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sundari & Mulyadi, 2018) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Lalu Zulpahmi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Pelaporan Barang Milik Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan koefisien beta 0,810 dan signifikansi 0,000. Sistem Pengendalian Intern juga berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan BMN dengan koefisien beta 0,394 dan signifikansi 0,000. Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan BMN dengan nilai F sebesar 57,862 dan signifikansi 0,000. Pemanfaatan Teknologi Informasi terbukti memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Pengelolaan BMN (koefisien 0,126; sig. 0,016), namun tidak memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern (koefisien 0,030; sig. 0,142).

SARAN

Perlu adanya pelatihan berkelanjutan untuk pegawai yang terlibat dalam pengelolaan BMN. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang regulasi, prosedur pengelolaan, serta teknologi terbaru yang relevan. Selain kemampuan teknis, soft skills seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan juga harus dikembangkan untuk mendukung efektivitas SDM dalam pengelolaan BMN. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap prosedur pengawasan dan kontrol, baik secara manual maupun melalui teknologi. Lakukan evaluasi berkala terhadap SPI untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang memerlukan peningkatan. SPI yang adaptif terhadap perubahan kondisi akan membantu menjaga kualitas pengelolaan BMN. Organisasi perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam meningkatkan keterampilan SDM. Platform e-learning, sistem manajemen pengetahuan, dan aplikasi pelatihan berbasis teknologi dapat digunakan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap sistem teknologi yang digunakan. Pastikan teknologi yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan khusus dari SPI, seperti aplikasi yang mempermudah pengawasan, laporan audit, dan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisykurlillah, I., & Oktaviana, A. (2020). The Quality of State-Property Reporting: Determinants and Intervening Role of Optimization Management in Indonesia Regional Case. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 127–139. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i2.25529>
- Arlini, M., & Darwanis, S. A. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).
- Azhar, I., & Darwanis, S. A. (2013). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302, 164.
- BPKP. (2015). *Peran Pengawasan Intern Mengamankan Aset Negara*.
- Chairannisa. (2014). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal*

- Akuntansi*, 1(1), 1–22.
- Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi: Bagaimana kualitas pengelolaan barang milik negara di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(2), 177–193.
- Ghozali, I. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jumardi, H. R., & Machmury, A. (2022). Kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan laporan pertanggungjawaban bendahara dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *E-JURNAL AKUNTANSI*, e-ISSN, 2302–8556.
- Kemenkumham. (2017). *Road map, solusi permasalahan klasik pengelolaan BMN*.
- Kurniawan, K., Saiful, S., & Midastuti, P. P. (2016). Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara. *Jurnal Fairness*, 6(2), 125–134.
- Mamuaja, B. (2016). Analisis efektivitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di dinas pendapatan kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mayang, F. A. (2024). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1357–1362.
- Mulyadi. (2017). *Auditing (Edisi 7)*. Salemba Empat.
- Nurbyianto, N. (2022). Peran Penilai Pemerintah Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2), 103–114.
- Nursin, D. (2023). *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Hasanuddin.
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik negara. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141–149.
- Sepiyana, P., & Hermain, H. (2023). Analisis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara: SIMAK-BMN) pada Pengelolaan Aset Negara (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3179–3195.
- Subrata, I. W., Yasa, G. W., & Astika, I. B. P. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang milik daerah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 477.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- Sundari, D., & Mulyadi, J. M. V. (2018). Kompetensi Pengelola Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 5(01), 26–36.
- Suwikantara, I. M. G. K., & Winaya, I. K. (2023). Peran dan Gaya Kepemimpinan Sekretaris Dewan Dalam meningkatkan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 221–230. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13679>
- Wahyuni, S. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Widjojanto, B. (2009). *Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan*. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, cet. Kedua.
- Yuliana, R. E., Taufik, T., & Nasrizal, N. (2021). Pengaruh kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi manajemen, sistem pengendalian intern terhadap efektivitas manajemen aset tetap di pemerintah kabupaten bengkalis dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 215–225.
- Zulpahmi, Z., Sumardi, S., & Yasinanda, S. K. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3449–3455.